

Approved For Release 1999/09/09 : CIA-RDP82-004[REDACTED]20010-0

RESTRICTED

25X1A

**UPAH
DAN
PEMOGOKAN**



Approved For Release 1999/09/09 : CIA-RDP82-00457R005000720010-0

RESTRICTED

Approved For Release 1999/09/09 : CIA-RDP82-00457R005000720010-0

BADAN PENERANGAN KATOLIK

Approved For Release 1999/09/09 : CIA-RDP82-00457R005000720010-0

UPAH DAN PEMOGOKAN.

1. Apakah arti perkataan „aturan upah”?

Aturan upah adalah peraturan, dimana pembayaran atau upah diberikan kepada seseorang sebagai pengganti atas tenaga atau kerdja jang telah diberikan. Aturan itu berdasarkan perdjandjian tentang upah. Madjikan dan pekerdja sepakat setjara ini. Sipekerdja hendak memberikan tenaga dan ketjakapannja dan madjikan hendak memberikan upah jang tertentu kepadanja.

2. Adilkah aturan upah itu?

Aturan upah pada dasarnja adalah adil. Aturan upah itu adalah perstudjuan jang merdeka, dimana jang seorang menawarkan tenaganja dan jang lain mempergunakannja. Apabila hal itu tiada dikerdjakan berlawanan dengan hukum alam dan deradjat manusia, tak ada sesuatu jang tidak adil.

Adalah menurut hukum alam, apabila seorang bekerdja giat² menerima upah harian jang pantas pula. Pekerdjaan jang lebih banjak, memberi hak atas pembayaran jang lebih tinggi.

Nilai pekerdjaan itu tidak hanja ditentukan oleh madjikan sadja; tetapi oleh pendapat umum dan pendapat wakil² madjikan² dan wakil² pekerdja² jang tidak berat sebelah.

Apabila pekerdjaan manusia itu dipandang sebagai barang dagangan, berlawanan dengan deradjat manusialah pandangan itu. Tentang hal ini Bapa Sutji Leo XIII menulis: "Memperlakukan manusia, sebagai binatang muatan jang dipergunakan untuk mentjari uang atau sebagai sekumpulan urat daging atau sebagai sedjumlah kekuatan alam, adalah perbuatan jang nista dan tidak mengenal peri kemanusiaan.

3. Apakah arti upah jang pantas?

Upah jang pantas ialah upah jang memungkinkan pekerdja jang baik tingkah lakunja serta suka menabung, agar supaja dapat sanggup menenjam kehidupan jang pantas. Djadi upah jang pantas lebih besar dari pada djumlah uang jang dibutuhkan untuk hidup sehari². Seharusnja dengan upah itu pekerdja jang keluarganja terdiri atas empat atau lima orang anak², dapat hidup dengan senang dan tenteram. Upah jang serupa itu tidak sama diseluruh dunia. Upah jang pantas dalam suatu negara, mungkin sekali terlalu tinggi atau rendah dinegara lain. Hal itu tergantung pada tingkat kehidupan dan keadaan harga murah-mahalnya barang² dipasar dalam negara² itu.

4. Apakah sebabnja, maka pekerdja² berhak atas upah jang serupa itu karena hukum alam.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan djalan jang djudjur, dialam ini biasanja ada satu djalan bagi manusia, jaitu: pekerdjaan. Apabila manusia bekerdja dengan semestinja, maka orang itu harus dapat menerima segala sesuatu jang dibutuhkannja supaja dapat bekerdja demikian, jaitu upah jang tjukup untuk kehidupan jang pantas.

Hal itu berlaku djuga bagi kepala keluarga. Orang itu berkewadajiban memelihara keperluan hidup isteri dan anak-anaknja. Untuk hal itu, dia telah dianugerahi kekuatan bekerdja oleh Tuhan. Dengan pekerdjaan jang

5. Slapakah jang berkewadajiban untuk memelihara, supaja pekerdja itu dapat menerima upah jang panas ?

Terutama madjikannya. Tiap² perusahaan dan perindustrian harus menjukupi keperluan hidup mereka semuanya, jang mendjadi pekerdja dalam perusahaan atau perindustrian itu. Apabila dalam suatu perusahaan atau keradjinan ada kemungkinan untuk memberi upah pekerdja-pekerdjanja dengan pantas, madjikan wadjib memberinja.

Selanjutnja, pembentukan susunan ekonomi, jang memberi kemungkinan untuk pembayaran upah jang pantas, adalah kewadajiban seluruh masyarakat. Pembentukan itu bukan hanja kewadajiban Pemerintah sadja. Tiap² warga-negara harus membantu pemerintah untuk melenjapkan segala keadaan jang merintang adanja upah jang pantas.

Apabila dalam sebuah perusahaan ada kemungkinan untuk mengadakan upah jang pantas, hukum alam dan pertanggung djawab dari madjikan² akan mengandjurkan supaja upah jang serupa itu dilakukan. Apabila kewadajiban itu tidak diperdulikan oleh madjikan, dapatlah serikat² sekerdja mengadakan tindakan. Mungkin djuga Negara memaksakannya dengan undang², terutama djika kedudukan pekerdja² lemah, karena kekatjauan organisasi² dan madjikan² tetap berkepala batu.

6. Apakah jang harus dikerdjakan, apabila sebuah perusahaan atau tjabang perindustrian tidak dapat memberikan upah jang pantas, sedangkan hal itu terdjadi bukan karena kesalahan madjikan ?

1. Madjikan itu tiada berwadajib mengadakan upah jang tak dapat ditanggung oleh perusahaan atau bengkelnja.

2. Madjikan sendiri berhak menerima bajaran jang sederhana, sebagai penjuluh perusahaan, tetapi kemudian ia harus berusaha untuk memberi upah minimum jang adil.

3. Pemegang² sero baro berhak menerima sebagian dari keuntungan, apabila kebutuhan² pekerdja² telah dipelihara.

Apabila perbaikan² tidak mungkin diadakan, sedangkan perusahaan atau industri itu perlu bagi masyarakat, negara harus memberikan tundingan kepada perusahaan atau keradjinan itu. Apabila tundingan itu tiada diberikan oleh pemerintah perusahaan atau keradjinan itu harus dihentikan. Dalam hal itu, pertama-tama pekerdja² harus diberi kesempatan untuk bekerdja ditempat lain atau setidak-tidaknja diberi tundingan. Tindakan itu adalah kewadajiban madjikan dan pemerintah.

7. Bagaimanakah upah jang pantas itu harus ditentukan ?

Hal itu tiada mudah menentukannya. Tentu sadja hal itu tergantung terutama pada keperluan² pekerdja dan keluarganya sesuai dengan tingkatan hidup ditempat kediamannya.

Tetapi disamping itu tidak boleh dilupakan : bahwa permintaan gadji sampai 100% tiada pada tempatnja, apabila berhubung dengan keadaan perusahaan atau keradjinan itu tidak dapat memenuhinja. Walaupun kurang senang, harus diterima djuga, apabila hal itu tiada mungkin diubah. Upah jang terlampau tinggi, sebagai upah jang terlampau rendah merugikan kesedjahteraan masyarakat djuga. Orang² harus berusaha mentjapai ukuran upah jang memberi kepastian akan kesempatan bekerdja. Hal itu baru mungkin kalau ada kerdja sama jang djudjur antara madjikan dan pekerdja².

Kekurangan untung sebuah keradjinan, belum merupakan alasan tjukup untuk menurunkan upah pekerdja².

8. Dapatkah dikatakan, bahwa seorang madjikan telah memenuhi kewadjabannya, apabila ia telah mengupah pekerdja-pekerdjanja dengan tjukup ?

Tidak. Madjikan itu harus berusaha mengadakan sjarat² bekerdja jang pantas. Diantaranya : kesempatan beristirahat jang tjukup, waktu kerdja

Pekerdja itu berhak untuk beristirahat setjukupnja, supaja dapat memperhatikan kebahagiaan djiwanja dan supaja dapat mengumpulkan tenaga jang tjukup untuk bekerdja terus. Adalah berlawanan dengan keadilan dan peri kemanusiaan, djika untuk memelihara keperluan hidup seorang pekerdja harus bekerdja sebanjak-banjaknja, sehingga pekerdja itu tiada mendapat kesempatan untuk memperhatikan sesuatu jang lebih mulia dan badan jang seharusnja kuat kembali makin lemah. Lama pekerdjaan itu tergantung djuga pada sifat pekerdjaan. Makin berat pekerdjaan itu, harus makin singkat pula waktu bekerdja dan makin tinggi upahnja pada tiap² djam.

9. Adakah kabiasaan jang tjurang pada aturan upah pada masa sekarang?

Memang begitu. Tidak semua pekerdja menerima upah jang pantas bahkan upah jang boleh kita sebut upah minimum. Banjak pekerdja jang bekerdja dengan upah jang tak tjukup untuk pembeli makan dan banjak djuga jang diperas tenaganja. Pemerasan tenaga itu terutama terdjadi dengan adanja waktu bekerdja jang terlalu lama, tempat kerdja jang kurang bersih, pemakaian tenaga wanita dan anak², sebab mereka dapat dibayar kurang daripada orang dewasa, selalu mengurangi upah tiap² pekerdjaan.

Disini bertemu tindakan² jang tidak adil, karena memberikan setjara tidak djudjur pembayaran untuk pengganti pekerdjaan jang telah dilakukan.

Disini kita menghadapi tekanan terhadap jang lemah dan penahanan upah jang adil. Perbuatan itu adalah dosa, jang akan dihukum dan akan kena laknat Tuhan.

10. Bagaimana kita dapat menghadapi kedjahatan² itu ?

Tanggung djawab atas tindakan² jang tjurang serupa itu ada pada seluruh masyarakat. Manusia selalu berusaha mendapat barang sebanjak-banjaknja dengan mengeluarkan uang seketjil-ketjilnja. Pedagang² selalu mentjoba berlaku serupa itu. Biasanja pemerintah tidak berapa memperdulikan akibat² sikap jang serupa itu. Djadi pedagang² dan pemerintah bertanggung djawab atas perlakuan² jang tidak adil terhadap pekerdja².

Satu-satunja tjara untuk mengachiri tindakan² jang tjurang itu ialah : pembayaran upah jang pantas. Pekerdja² jang harus bekerdja dengan sjarat² jang tidak menjenangkan itu harus mempersatukan diri dalam suatu perkumpulan. Apabila hal itu tiada mungkin, Negara harus melindungi mereka. Perlindungan itu terutama harus dilakukan terhadap wanita dan anak², sebab mereka itu lebih mudah binasa dari pada orang laki².

11. Apakah Geredja setudju akan adanja serikat² pekerdja² ?

Geredja sotudju akan adanja serikat² pekerdja² dan mempertahankan hak dan kepentingan untuk mengatur diri akan mendjamin keselamatan dan kebahagiaan pekerdja². Mengenai hal itu Bapa Sutji Leo XIII menulis : „Dapat kita tentukan sebagai hukum jang umum dan tetap bahwa serikat² pekerdja harus diatur dan dipimpin sedemikian rupa, sehingga perserikatan-perserikatan itu merupakan alat jang sebaik-baiknja untuk mentjapai tudjuan jang dikehendaki. Tudjuan itu ialah: Menolong tiap² anggota, seorang demi seorang, untuk memperbaiki keadaan badan, djiwa, dan hak milik sebanjak-banjaknja”.

Mula² hak untuk mempersatukan diri dalam persatuan² itu ditentang dan dilawan oleh beberapa orang. Pada umumnja, hak itu pada masa ini disetudju dan mungkin tidak akan disangsikan lagi.

Kepentingan akan adanja persatuan² itu terang djuga. Sebagai orang jang berdiri sendiri, tiap² pekerdja sukar dapat mentjapai sesuatu. Dalam susunan ekonomi, dimana orang tidak memperhatikan suara hatinja dan dimana dasar² jang sopan dan adil tidak dilakukan orang, perlu sekali adanja serikat² pekerdja. Perserikatan² itu adalah suatu alat untuk memperoleh sjarat² kerdja dan upah jang pantas.

12. Adakah pekerdja² berhak untuk mengadakan pemogokan ?

Menurut alam pekerdja² itu mempunyai hak untuk mengadakan pemogokan, tetapi hak itu harus dipergunakan berdasarkan alasan jang sjah. Manusia bebas untuk memberikan atau tidak memberikan tenaganja. Manusia itu mempunyai hak sepenuh-penuhnja untuk berhenti bekerdja, apabila ia diperlakukan kurang adil, apabila diperas tenaganja atau apabila ia harus bekerdja dengan sjarat² jang terlalu buruk baginja.

13. Apabila pemogokan itu diadakan berdasarkan alasan jang sjah ?

Orang² baru boleh mulai mogok apabila ada alasan jang sungguh² dan adil. Orang² mogok, apabila permintaannya tiada dipenuhi. Tetapi permintaan itu haruslah permintaan pantas lagi adil. Hal itupun belum tjukup untuk didjadikan alasan mogok. Orang harus djuga memperhatikan, apakah keuntungan jang hendak ditjapai itu seimbang dengan kerugian pekerdja² sendiri, perusahaan atau perindustrian lagi pula kerugian masyarakat, jang disebabkan oleh pemogokan itu.

Karena pemogokan itu banjak mengakibatkan kesukaran, haruslah ada harapan akan berhasil. Apabila pemogokan itu salah djalannya atau tidak berhasil, maka keadaan pekerdja² akan lebih djelek dari pada sebelumnya. Karena itu pemogokan itu baru boleh diadakan djika djalan² lain untuk mentjapai hasil telah sia² belaka.

Suatu pemogokan sekali-kali tidak boleh berlawanan dengan keadilan. Apabila antara pekerdja dan madjikan telah ada kontrak kerdja jang adil, maka pemogokan jang diadakan berlawanan dengan keadilan. Seorang pekerdja tidak boleh melanggar perdjandjian, jang telah diadakannya dengan bebas, jang dipandang dari sudut manapun djuga boleh dikatakan adil dan jang telah ditepati oleh madjikan dengan djudjur.

Suatu pemogokan harus bertudjuan memperoleh perlakuan jang baik terhadap pekerdja. Pemogokan² jang diadakan dengan bertudjuan politik berlawanan dengan apa jang baru kita sebutkan tadi dan pemogokan jang serupa itu tidak mungkin dapat dibenarkan.

14. Apakah pemogokan simpati diidinkan ?

Pemogokan simpati terdjadi, apabila perserikatan² mengadakan pemogokan tidak untuk kepentingan sendiri tetapi untuk membantu pemogokan jang dilakukan oleh perserikatan lain. Oleh karena kerugian-kerugian jang diakibatkan djauh lebih besar, apabila perserikatan lain turut mengadakan pemogokan, maka alasan² untuk mengadakan pemogokan simpati itu harus lebih berat daripada alasan² untuk mengadakan pemogokan biasa.

Supaja suatu pemogokan simpati adalah adil, perlulah pekerdja² diperusahaan atau keradjanan lain diperlakukan amat tidak adil. Apabila pemogokan simpati itu didjalankan hanja untuk menundukkan madjikan² sadja, maka pemogokan itu dilarang.

Tiap² pemogokan jang berlawanan dengan hak² masyarakat tidak diperkenankan. Sebagai tjontoh kita sebutkan : pemogokan dokter², pemogokan pegawai² pemerintah, pemogokan polisi dll. Oleh karena itu pemogokan umum jang biasanja merupakan pemogokan simpati tidak mungkin adil, sebab pemogokan² itu terang berlawanan dengan hak² masyarakat.

15. Bolehkah orang² mengandjur-andjurkan pemogokan ?

Tidak! Manusia mempunyai hak untuk mogok, tetapi oleh karena itu tidak semua pemogokan diperbolehkan atau bidjaksana. Suatu pemogokan adalah sematjam perang. Suatu perang mengakibatkan bermatjam-matjam hal jang tidak diinginkan, misalnja : pembunuhan, perampasan, pembakaran dll. Pemogokan menimbulkan kebentjan antara golongan², seringkali menjebakkan adanya perbuatan² jang mengerikan, berarti penderitaan dan kemiskinan bagi kaum-kaum tertentu.

Approved For Release 1999/09/09 : CIA-RDP82-00457R005000720010-0

perdagangan dan kesedjahteraan umum. Apabila pertjobaan² untuk mengubah pendapat para madjikan sia² sadja, dapatlah Negara dimintai pertolongan sebagai pengantara. Negara baru wadajib mentjampuri pertikaian² pekerdja atas kehendak sendiri, apabila kesedjahteraan umum terlampau menderita kerugian karena adanja pemogokan itu.

- 16. Apabila upah jang pantas dibajarkan, dapatkah dikatakan bahwa permintaan keadilan umum sudah dipenuhi ?**

Sebetulnja tidak. Aturan upah itu seharusnya disusun sedemikian rupa, sehingga pekerdja² ketjuali upah djuga masih menerima sebagian dari keuntungan perusahaan. Keuntungan ialah sisa dari pada modal, jang telah dikurangi untuk membajar segala biaja². Dalam biaja itu termasuk : bunga untuk modal jang dimasukkan dalam perusahaan, pembuangan mesin² tua, uang jang dikeluarkan sebagai upah dan gadji pekerdja-pekerdja.

Sudah semestinja, kalau pekerdja² menerima sebagian dari keuntungan itu. Pembagian kekajaan alam ini harus sedemikian rupa, sehingga dengan kekajaan itu kebahagiaan umum makin meluas. Apabila pekerdja², ketjuali menerima upah masih menerima sebagian dari pada keuntungan, maka harta benda pekerdja² itu dapat bertambah dan dengan demikian naik djuga kedudukannja dalam masyarakat. Keuntungan suatu perusahaan adalah hasil dari tenaga pekerdja² djuga.

- 17. Mengapakah modal itu tiada berhak atas semua hasil kerdja ?**

Suatu aturan jang mengakibatkan segolongan ketjil manusia memiliki segala-galanja, tidak mungkin menjebabkan berkembangnja kebahagiaan umum. Antara itu hanja menjebabkan nasib pekerdja² mendjadi sedikit lebih baik dari pada nasib budak belian. Manusia itu sekali-kali bukan bagian mesin, tetapi machluk Tuhan, jang terdiri atas djiwa dan badan. Pekerdjaannja mempunjai nilai jang lain dari pada mesin dan oleh karena itu berhubung dengan modal tidak boleh dipandang sebagai barang dagangan dengan tidak mengingat kemuliaan deradjat manusia.

- 18. Apakah sebabnja, maka tenaga itu tidak mempunjai hak atas semua hasil kerdja ?**

Apa jang dihasilkan oleh sebuah perusahaan adalah hasil dari modal dan kerdja. Jang satu tak dapat dipisahkan dari jang lain. Djadi jang satu tida boleh merintangj jang lain untuk mendapat sebagian dari keuntungan sebuah perusahaan atau keradjinan. Perdamaian, jaitu bantu-membantu antara modal dan kerdja adalah kepentingan kedua-duanja. Hanja itulah satu-satunja djalan untuk mengachiri pertentangan antara golongan². Hanja itulah alat untuk melenjapkan sikap² jang tidak pada tempatnja dalam perdagangan dan perusahaan. Hanja itu pulalah djalan untuk mendjaga agar keadaan suatu bangsa tetap sehat dan kuat.

Approved For Release 1999/08/09 : CIA-RDP82-00457R005000720010-0

RESTRICTED

Approved For Release 1999/08/09 : CIA-RDP82-00457R005000720010-0

RESTRICTED